



Pengaruh Penerapan *E-Government*, Transparansi dan Maturitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng

Ketut Yuni Suryani^{1*}, Made Aristia Prayudi², I Gede Putu Banu Astawa³

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

Korespondensi penulis: yuni.suryani@student.undiksha.ac.id¹, prayudi.acc@undiksha.ac.id², banu.astawa@undiksha.ac.id³

Abstract: *This study aims to analyze the effect of e-government implementation, Transparency and Maturity of Internal Control System (SPI) on the Quality of Buleleng Regency Government Financial Reports. The research method uses a quantitative approach with a survey method through the distribution of questionnaires to 74 respondents consisting of heads of financial sub-sections and financial report preparation staff at 37 Regional Work Units (SKPD) in Buleleng Regency. The sampling technique uses purposive sampling. Data are analyzed using multiple regression with the help of SPSS 26. The results of the study indicate that the e-government variable does not have a significant effect on the quality of Buleleng Regency government financial reports. Meanwhile, the Transparency and Maturity of Internal Control System (SPI) variables have a positive and significant effect on the quality of Buleleng Regency government financial reports. This finding indicates that the higher the level of implementation of transparency and maturity of the internal control system (SPI), the better the quality of local government financial reports. However, the implementation of e-government has not yet made a significant contribution, possibly due to the suboptimal implementation of the reporting system, which focuses solely on service and administration, and the limited use of technology by human resources. Therefore, the Buleleng Regency government is expected to improve the effectiveness of its e-government implementation and continue to strengthen the transparency and maturity of its internal control system (SPI) to improve the quality of its financial reports.*

Keywords: *E-Government, Transparency, Internal Control System Maturity, financial report quality.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-government*, Transparansi dan Maturitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 74 responden yang terdiri dari kepala subbagian keuangan dan staf penyusunan laporan keuangan pada 37 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Buleleng. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Data dianalisis menggunakan regresi berganda dengan bantuan SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *e-government* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Sementara itu variabel Transparansi dan Maturitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Temuan ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi tingkat penerapan transparansi dan maturitas sistem pengendalian internal (SPI), maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik. Namun, penerapan *e-government* belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan, yang diduga disebabkan karena belum optimalnya implementasi sistem pelaporan yang hanya berfokus pada pelayanan dan administrasinya serta keterbatasan pemanfaatan teknologi oleh sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Buleleng diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan *e-government* serta terus memperkuat transparansi dan maturitas sistem pengendalian internal (SPI) guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Buleleng.

Kata kunci: *e-Government, Transparansi, Maturitas Sistem Pengendalian Internal, kualitas laporan keuangan.*

1. LATAR BELAKANG

Di era reformasi saat ini, penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi syarat utama bagi setiap pemerintah untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa,

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang perlu terus melakukan perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi, sehingga kualitas laporan sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia yang menjalankannya. (Azizah, 2022). Datur dalam PP No. 71 Tahun 2010, setiap entitas akuntansi wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.(Julianto, 2019)

Fenomena penelitian ini yang berfokus pada wilayah Kabupaten Buleleng sebagai salah satu kabupaten di Bali yang mulai menerapkan *e-government* dengan penggunaan teknologi untuk pengelolaan kualitas pelaporan keuangan pemerintah yang transparan. LKPD menjadi acuan penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dalam pengambilan keputusan (Ariade, 2023). Kabupaten Buleleng memiliki capaian opini WTP beberapa kali yang menunjukkan adanya komitmen terhadap kualitas laporan keuangan. Namun BPKAD masih menemukan kelemahan Sistem Pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan belum sepenuhnya didukung oleh sistem pengendalian yang matang. Hal yang paling menonjol pada laporan tahun 2023 dan 2024 adanya potensi kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup Signifikan.

Gambar 1. Data Rekapitulasi Temuan

Temuan					
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023	Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024				
Pengelolaan pendapatan Retribusi daerah belum sepenuhnya sesuai ketentuan	Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan (Pendapatan retribusi pelayanan 13 puskesmas. penetapan asset belum ada data actual dan pendapatan retribusi persetujuan bangunan Gedung belum dikelola secara optimal				

Sumber : BPK (Ri, 2023)

Selain itu dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas diperlukan sistem pengendalian internal atas laporan keuangan untuk mencegah masalah yang timbul akibat lemahnya pengawasan dan pengendalian untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal.(Cahyani, 2023). Sistem Pengendalian yang memadai menjadi hal penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Cahyani, Kadek Gita Sari & Nyoman, 2024). Hal ini mencakup penerapan etika penggunaan teknologi dalam organisasi serta pembinaan kewargaan pada penyedia layanan publik.(Lihadnyana, 2024). Dengan demikian, kinerja aparatur pemerintah dapat ditingkatkan dan potensi korupsi dapat ditekan melalui penerapan prinsip-prinsip antikorupsi yang dapat dipantau secara transparan. Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam *good governance*. Prinsip ini mencerminkan adanya administrasi publik yang terbuka.(Wahyuzan, Amyra Putri, 2023) Saat ini, banyak upaya telah dilakukan untuk mendorong transparansi diberbagai jenjang. Hal ini karena transparansi diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah serta memperluas penyampaian informasi kepada publik mengenai kebijakan dan kinerja pemerintah (Syamsul & Siti Zuhroh, 2021).

Salah satu ciri pemerintahan yang baik adalah penerapan *good governance*, yaitu pemerintahan yang menolak nepotisme, korupsi, dan kolusi, serta mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Untuk mendukung penyampaian informasi dari pemerintah pusat ke daerah, hingga ke unit pemerintahan terkecil, diperlukan penerapan *e-government* yang dapat mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat. Adapun perbandingan *e-government* yang ada di Provinsi Bali berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik.

Gambar 2: SPBE Tahun 2024

<u>Kabupaten / Kota</u>	<u>Indeks SPBE</u>	<u>Keterangan</u>
Kota Denpasar	3,80	Sangat Baik
<u>Kabupaten Tabanan</u>	3,77	Sangat Baik
<u>Kabupaten Badung</u>	3,66	Sangat Baik
<u>Kabupaten Buleleng</u>	3,45	Baik
<u>Kabupaten Jembrana dan Gianyar</u>	3,14	Baik
<u>Kabupaten Kelungkung</u>	3,02	Baik
<u>Kabupaten Bangli</u>	2,48	<u>Cukup</u>
<u>Kabupaten Karangasem</u>	2,30	<u>Cukup</u>

Sumber: <https://ww.baliprov.go.id>

Indeks SPBE yang tinggi merupakan indikator penting dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel yang berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan publik melalui penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik. Dalam tabel SPBE diatas dijelaskan bahwa Kabupaten Buleleng indeks SPBE 3,45 dengan predikat baik yang mencerminkan bahwa dalam kualitas pelayanan Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya optimal untuk mencapai predikat sangat baik.

Fenomena penerapan *e-government* di daerah masih menunjukkan variasi hasil dan belum sepenuhnya optimal. Penelitian (Batubara et al., 2019) menemukan bahwa pengelolaan website perangkat daerah di Padang Pariaman masih jauh dari maksimal karena kendala sumber daya manusia, infrastruktur, dan *political will*, sehingga tidak memberikan bukti empiris atas pengaruhnya terhadap kualitas LKPD. Hal ini diperkuat oleh (Pertiwi et al., 2021) yang mengungkapkan bahwa beberapa desa di Kecamatan Panca Rijang memang telah memiliki website desa, tetapi implementasinya belum optimal akibat keterbatasan SDM, baik aparatur maupun masyarakat. Website desa yang tidak informatif justru menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, (Anjani, N. Ajeng Rosiana, 2024) menunjukkan bahwa sistem informasi pemerintah daerah (SIPD), sebagai wujud *e-government*, memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan SPI tidak berpengaruh signifikan. Hasil berbeda juga ditunjukkan oleh (Cahyani, Kadek Gita Sari & Nyoman, 2024) yang

menyoroti penerapan *e-government* melalui penggunaan SIPD di BPKPD Kabupaten Buleleng. Penelitian tersebut menemukan bahwa rekonsiliasi laporan keuangan SKPD masih mengalami hambatan, belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, serta belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

Terkait dengan transparansi, hasil penelitian juga menunjukkan ketidakkonsistenan. Di satu sisi, transparansi dianggap sebagai faktor penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian (Rahayu & Dewi, 2022) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Buleleng. Namun, penelitian lain menyoroti bahwa penerapan *e-government* yang seharusnya mendukung transparansi belum optimal. Seperti ditunjukkan oleh (Cahyani, Kadek Gita Sari & Nyoman, 2024) meskipun SIPD telah diterapkan, laporan keuangan masih belum sepenuhnya transparan dan akuntabel.

Dalam hal maturitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), hasil penelitian juga memperlihatkan perbedaan pandangan. (Heinrich & Probohudono, 2023) membuktikan bahwa SPI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Bahkan, komitmen organisasi memperkuat pengaruh SPI tersebut. Namun, mereka juga menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, serta komitmen organisasi tidak memperkuat pengaruh teknologi informasi. Di sisi lain, penelitian oleh (Anjani, N.Ajeng Rosiana, 2024) justru menemukan bahwa SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sementara *e-government* melalui SIPD berpengaruh signifikan. Perbedaan hasil ini menunjukkan terdapat kesenjangan penelitian yang menunjukkan bahwa pengaruh penerapan *e-government*, transparansi, dan maturitas SPI terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih perlu diteliti lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menguji ketiga variabel tersebut secara simultan pada lingkup pemerintah daerah Kabupaten Buleleng, yang memiliki karakteristik tersendiri dalam pengelolaan keuangan daerah. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memperoleh bukti empiris yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang benar-benar berpengaruh terhadap

peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan perbaikan tata kelola keuangan daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1. Teori Pertanggungjawaban (*Stewardship Theory*)

Teori *steward* merupakan teori akuntansi yang berkembang bersama akuntansi dan kemudian di perluas ke bidang lainnya yang berasal dari keilmuan aliran manajemen yang mengacu pada pendekatan teoritis dengan menekankan tanggungjawab manajer atau agen Perusahaan untuk mengelola asset Perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan pemilik atau principal. Tujuannya untuk mengelola asset Perusahaan dengan mempertimbangkan teori pemilik yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan asset Perusahaan. (Syara, 2024)

Penelitian ini didasarkan pada *stewardship* yang menyatakan bahwa aparat pemerintahan memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak demi kepentingan publik.

2.2. Good Governance

Governance didefinisikan sebagai mekanisme, praktik dan prosedur bagi pemerintah dan warga negara untuk mengatur sumber daya dan menyelesaikan masalah publik. Adanya *good governance* menjadi bagian dari wacana tentang Pembangunan paradigma birokrasi dan Pembangunan dimasa depan. Pengelolaan pemerintah yang sesuai dengan norma sesuai dengan penetapan UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan merupakan landasan yang baik dalam pencegahan praktik pelanggaran kode etik, sehingga pemerintah dituntut untuk mampu melaksanakan pemerintah yang transparan, efisien, akuntabel dan birokrasi yang baik.

2.3. Transparansi

Transparansi merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemma mengenai informasi keuangan bersifat terbuka dan jujur dimana setiap masyarakat memiliki hak katas akses keterbukaan informasi tersebut sesuai dengan peraturan

Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.(Yumia, 2021). Transparansi dapat membatasi atau mencegah banyak peluang perilaku korupsi.(Maharani, 2025)

2.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan perilaku atau sikap akuntan yang menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan peningkatan kinerjanya. Mengelola penggunaan data teknologi informasi dapat memberikan keuntungan dan mengurangi kesalahan. Penggunaan teknologi informasi sangat membantu untuk mempercepat pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan agar laporan keuangan tidak kehilangan nilai informasinya. Penggunaan teknologi informasi merupakan tingkat integritas tugas akuntansi. Ema Kartika, 2022.

2.5. Maturitas SPI (Sistem Pengendalian Internal)

Sistem pengendalian Internal dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem ini harus dibangun dan menjadi tanggung jawab Bersama oleh semua Perrangkat Daerah (PD) dalam sebuah Pemerintah Daerah. (Ariesty, 2021)

Keberhasilan Sistem Pengendalian Internal pemerintahan di pelukan penilaian tingkat maturitas Penyelenggaraan SPI dalam mencapai tujuan pengendalian internal, sehingga semakin tinggi nilai tingkat maturitas SPI maka semakin baik pula penerapan SPInya, oleh karena itu Pemerintah meningkatkan dan melakukan pengkajian ulang mengenai system pengendalian Internal yang diterapkan karena berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.(Sujana, 2023)

2.6. Kualitas Laporan

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi pemerintah memberikan pengertian laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh

suatu entitas pelaporan. Menurut kamus besar Indonesia. Kualitas adalah tingkat baik buruknya suatu kadar derajat (kepandaian, kecakapan, dan sebagainya) atau mutu. Jadi kualitas laporan adalah derajat atau mutu laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan yakni pemerintah daerah dalam periode satu tahun. (Mustaqmah, Sri Asyrafil, Putri, 2022)

Laporan keuangan diyakini memiliki kualitas tinggi apabila memenuhi persyaratan relevansi, dapat diandalkan dapat dibandingkan dan dapat dipahami. (Fitriasari, 2024). Berikut penjelasan Keempat karakteristik berbasis akreal ini:

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, populasi yang terdapat pada penelitian ini merupakan Kabupaten Buleleng. Sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria responden : (1) Kasubang umum akuntansi dan (2) Staf penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Jumlah sampel yang diperoleh adalah 74 responden. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara online. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan instrumen kuesioner berbasis skala likert 1-5, yang mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diajukan terkait variabel penelitian.

Instrumen penelitian diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil uji menunjukkan seluruh indikator valid (r hitung $>$ r tabel) dan reliabel (Cronbach'Alpha $>$ 0,70). Teknik Analisis Data menggunakan bantuan program SPSS 26 melalui tahapan: uji Asumsi Klasik (uji normalitas, multikoneritas dan heteroskedastisitas), analisis Regresi Linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, Uji t untuk menguji pengaruh parsial dan Koefisien determinasi (Adjusted R2) untuk melihat besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen)

Pengaruh Penerapan *E-Government*, Transparansi dan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Populasi yang termasuk dalam analisis ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat daerah SKPD Kabupaten Buleleng yang berjumlah 37 instansi

dengan 2 responden, sehingga total responden sejumlah 74 responden. Purposive sampling adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk memilih sampel.

B. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	74	22	38	31.14	3.512
X2	74	33	45	39.62	3.781
X3	74	68	90	77.78	6.528
Y	74	49	65	56.96	5.478
Valid N (listwise)	74				

Sumber: Output SPSS 26.0 For windows (2026)

Data *E-government* (X_1) menunjukkan skor minimum 22 dan skor maksimum 38. Skor rata-rata 31.14 dengan standar deviasi 3.512. hal ini menunjukkan penyebaran data *e-goverment* pada penelitian ini berdistribusi merata, yang berarti selisih data satu dengan lainnya tidak terlalu jauh atau tinggi.

Data Transparansi menunjukkan skor minimum 33 dan skor maksimum 45. Skor rata-rata 39,62 dengan standar deviasi 3,781. hal ini menunjukkan penyebaran data Transparansi pada penelitian ini berdistribusi merata, yang berarti selisih data satu dengan lainnya tidak terlalu jauh atau tinggi.

Data Maturitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) skor minimum 68 dan skor maksimum 90. Skor rata-rata 77,78 dengan standar deviasi 6,528 yang berarti penyebaran data Maturitas SPI pada penelitian ini berdistribusi merata, yang berarti selisih data satu dengan lainnya tidak terlalu jauh atau tinggi.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah skor minimum 49 dan skor maksimum 65. Skor rata-rata 56,96 dengan standar deviasi 5,478. yang berarti penyebaran data Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada penelitian ini berdistribusi merata, yang berarti selisih data satu dengan lainnya tidak terlalu jauh atau tinggi.

C. Uji Instrumen

Uji validitas

Keputusan validnya suatu data dilihat apabila signifikansi (Sig) < $\alpha = 0.05$. Berdasarkan tabel nilai Sig lebih kecil dari 0,05 sehingga bisa diputuskan bahwa

semua item pernyataan pada koefisien *e-government*, Transparansi, Maturitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dinyatakan Valid.

Uji realibilitas

Suatu instrument dikatakan reliabel apabila nilai *Croanbach Alpha* lebih besar dari 0,70. Hasil uji reliabilitas pada tabel menunjukkan bahwa semua variabel memiliki *Croanbach Alpha lebih besar* dari 0,70. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrument *e-government*, Transparansi, Maturitas SPI dan Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah reliabel atau memenuhi syarat.

D. Uji multikolinieritas

Tabel Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Colinearity statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
E-Government (X1)	0,694	1.441	Tidak ada Multikolinieritas
Transparansi (X2)	0,383	2.610	Tidak ada Multikolinieritas
Maturitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) (X3)	0,355	2.814	Tidak ada Multikolinieritas

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF dari masing – masing variabel bebas lebih kecil dari 10 atau < 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10 atau $> 0,10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolenieritas dalam data penelitian ini.

E. Uji Heteroskedasitas

Tabel. Hasil uji Heteroskedasitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.033	2.991		-.011	.991

	E-Goverment	-.001	.083	-.002	-.018	.986
	Transparansi	.150	.103	.276	1.453	.151
	Maturitas SPI	-.052	.062	-.165	-.835	.406
a. Dependent Variable: ABS_RES						

Sumber: Output SPSS 26.0 *For Windows* (2026)

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa nilai Sig variabel *e-government* sebesar 0,986, Transparansi sebesar 0,151, Maturitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) sebesar 0,406. tidak terjadi heteroskedastistas dalam model regresi, sehingga model memenuhi asumsi homoskedastisitas.

F. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Dan Uji t
Coefficients^a

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.781	4.086		.191	.849
	E-Goverment	.011	.113	.007	.098	.922
	Transparansi	.671	.141	.463	4.762	.000
	Maturitas SPI	.376	.085	.448	4.434	.000

a. Dependen Variabel : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Output SPSS 26.0 *For Windows* (2026)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

$$Y = 0,781 + 0,011X_1 + 0,671X_2 + 0,376X_3 + \epsilon$$

Berdasarkan hasil uji t variabel *e-government* menyatakan nilai Sig. 0,922 yang dimana lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *e-government* (X1) tidak terdapat pengaruh signifikan namun berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Maka H₁ Ditolak.

Hasil uji t pada variabel transparansi menyatakan nilai Sig. 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel

Transparansi (X2) berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Maka H_1 Diterima

Hasil uji t pada variabel Maturitas SPI menyatakan nilai Sig. 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Maturitas SPI (X3) berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jadi pada Kesimpulannya hasil uji t Maturitas SPI mendukung hipotesis yang diajukan, maka H_1 Diterima.

G. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel. Rekapitulasi Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.864 ^a	.746	.735	2.818

a. Predictors: (Constant), Maturitas SPI, E-Government, Transparansi

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : Output SPSS 26.0 *For Windows* (2026)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa koefisien determinasi sebesar 0,735 atau 73,5%. Hal ini menunjukkan bahwa 73,5 % Kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh variabel *E-government*, Transparansi dan Maturitas SPI, dan Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sisanya sebesar 26,5%

H. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan Pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *E-government* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten buleleng. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yang menyatakan nilai Sig 0,922 lebih besar dari 0,05 yang berarti H1 ditolak
2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten buleleng. Hal ini dapat dilihat dari uji t yang menyatakan nilai Sig 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti H2 bisa diterima
3. Maturitas sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten buleleng. Hal ini dapat dilihat dari uji t yang menyatakan nilai Sig 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti H3 bisa diterima

Saran

1. Bagi SKPD Kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan *e-government* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, bagi pemerintah daerah khususnya SKPD Kabupaten Buleleng disarankan tidak hanya meningkatkan penggunaan *e-government* secara umum, tetapi juga melakukan langkah konkret untuk mengoptimalkan pemanfaatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan integritas sistem *e-government* dengan aplikasi pengelolaan keuangan daerah, memberikan pelatihan teknologi informasi secara berkelanjutan kepada aparatur yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan daerah, serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah agar tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi tetapi juga mampu meningkatkan akurasi, efisiensi, dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, terkait dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat memperthankan dan meningkatkan keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan akses publik

terhadap laporan keuangan pemerintah daerah melalui media digital seperti website resmi pemerintah daerah, portal keterbukaan informasi publik, serta sistem informasi keuangan daerah sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi keuangan secara lebih mudah, cepat dan transparan.

Selanjutnya mengenai maturitas sistem pengendalian internal (SPI) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah disarankan untuk terus meningkatkan tingkat maturitas SPI, dengan melakukan penguatan fungsi pengawasan intern pemerintah (APIP), dan pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas sistem pengendalian internal yang semakin matang, sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan menjadi lebih andal, akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan dalam mencari data penelitian agar lebih memfokuskan proses pengumpulan data secara langsung pada sampel yang dibutuhkan dan peneliti diperlukan untuk mempersiapkan dokumen administratif yang diperlukan sejak awal agar proses pengambilan data dapat berlangsung lebih efektif, efisien dan tepat waktu. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat memperluas cakupan wilayah penelitian, misalnya dengan menggunakan sampel pada tingkat provinsi atau lintas kabupaten/kota, sehingga hasil penelitian yang diperoleh memiliki tingkat

DAFTAR REFERENSI

- Anjani, N.Ajeng Rosiana, G. dk. (2024). Pengaruh Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kecamatan Cicalengka. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, 18(April).
- Ariade, M. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(02), 226–237. <https://doi.org/10.23887/jap.v14i02.61413>
- Ariesty. (2021). *CURRENT Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*. 1, 143–165.

- Azizah, E. N. (2022). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Kecamatan Kabupaten Bintan*.
- Batubara, Herlina., & Rolania.Helmy, E. (2019). *Analisis Pengembangan Electronic Government Melalui Penyelenggaraan Website Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(4), 1666–1686. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i4.169>
- Cahyani, Kadek Gita Sari, W., & Nyoman, D. (2024). *Penerapan, Hambatan, Dan Solusi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dalam Pelayanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Skpd Di Bpkpd Kabupaten Buleleng*. 19(5), 1–23.
- Cahyani, I. A. P. S. C. (2023). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Sistem Pengendalian Internal Dan pelatihan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUMDes (Studi Kasus BUMDes di Kabupaten Buleleng)*. 2, 642–653.
- Fitriasari, D. (2024). *Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung)*. *Jurnal Bina Akuntansi*, 11(2), 34–54. <https://doi.org/10.52859/jba.v11i2.649>
- Heinrich, A., & Probohudono, A. N. (2023). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(2), 411–424. <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v3i2.7150>
- Julianto, I. P. (2019). *IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP), SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN PERAN INTERNAL AUDIT INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP (Sumber : Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Jurnal Akuntansi Profesi I. 10(2), 45–53*.
- Lihadnyana, K. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Buleleng. Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_P_EMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Maharani, A. Q. (2025). *Pengaruh E-Government dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Maharani, As'syifa Qolbi*, 2.
- Mustaqmah, Sri Asyrafil, Putri, D. P. (2022). *PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYAMANUSIA, PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI*. VIII(1), 181–197.
- Pertiwi, A., Dema, H., Mustanir, A., & Anugrah, E. (2021). *Penerapan E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng)*. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(3),

130–139. <https://doi.org/10.55678/prj.v9i3.508>

- Rahayu, K. N. S., & Dewi, L. G. K. (2022). Pengaruh transparansi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 464–471.
- Ri, B. (2023). Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten buleleng.
- Sujana, E. (2023). *PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG*. 24.
- Syamsul, & Siti Zuhroh. (2021). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT: DAMPAKNYA PADA TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(1), 1–10.
- Syara, H. (2024). Implementasi Dan Peran Teori Stewardship Pada Konteks Penelitian Akuntansi : Studi Literatur. *Penganggaran Perusahaan Teori Dan Aplikasi*, 3, 4716–4734.
- Wahyuzan, Amyra Putri, D. E. P. (2023). Implementasi E-Government dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern: Kajian Literatur di Kota Medan. *Journal of JAFTA*, 5(2), 36–51. <https://journal.maranatha.edu/index.php/jafta/article/view/8595><https://journal.maranatha.edu/index.php/jafta/article/download/8595/2831>
- Yumia, K. S. W. (2021). *Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi, Kultur Organisasi, Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Good Corporate Governance Pada Lpd Se-Kabupaten Buleleng*.